

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN APBDES MELALUI
APLIKASI SISTEM INFORMASI DESA (SID) BERBASIS WEBSITE DI DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

Ovie Andarista

14040254089 (PPKn, FISH, UNESA) ovieandarista1107@gmail.com

Oksiana Jatiningasih

0001106703 (Prodi S1 PPKn, FISH UNESA) oksianajatiningasih@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam mengontrol APBDes dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap APBDes melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes melalui aplikasi SID dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan tersebut. Subjek dalam penelitian ini ada 6 (enam). Data yang dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Kemudian data dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat desa Pulosari terkait pengawasan terhadap APBDes melalui aplikasi SID ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah karena masyarakat cenderung bersikap menunggu dan tidak ada tindakan preventif untuk melakukan fungsi kontrol terhadap APBDes. Yang melakukan pengawasan ini adalah masyarakat yang menguasai internet. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap APBDes melalui aplikasi SID ini adalah jaringan internet yang masih terbatas dan anggapan masyarakat bahwa pemerintah desa sudah transparan, sehingga tidak perlu adanya pengawasan yang ketat.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Sistem Informasi Desa (SID), Pengawasan

Abstract

The purpose of this study was to describe community participation in controlling APBDes and to identify the inhibiting factors of community participation in monitoring APBDes through a website-based Village Information System (SID) application. This study uses a qualitative approach with a type of descriptive research. The reason for choosing a qualitative approach is because it describes the community participation in APBDes supervision through the SID application and the constraints faced by the community in carrying out the supervision. The subjects in this study were 6 (six). Data collected using observation, interviews and documentation. The data was tested using source triangulation and technical triangulation by checking data to the same source with different techniques. Then the data is analyzed through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of research that have been conducted regarding the participation of Pulosari village communities regarding the supervision of APBDes through the SID application indicate that community participation is still low because people tend to be waiting and there is no preventive action to carry out control functions on APBDes. The ones who supervise this are the people who control the internet. Constraints faced by the community in conducting supervision of APBDes through the SID application are internet networks that are still limited and the public's perception that the village government is transparent, so there is no need for strict control.

Keywords: Community Participation, Village Information System (SID), Supervision

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi ini artinya rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi. Semua masyarakat mempunyai hak untuk berkontribusi

atau berpartisipasi di dalam pemerintahan. Dalam buku yang berjudul *elite lokal dan civil society* Yusron (2009:13) menyatakan banyak yang mengatakan *icon* demokratisasi adalah *civil society*, selain karena ada dinamika internal politik di Indonesia. Keberhasilan gerakan demokrasi di luar negeri yang sedikit banyak

mempengaruhi gerakan prodemokrasi di Indonesia untuk terus mendorong proses demokratisasi melalui penguatan ide *civil society* untuk dapat menyejajarkan posisinya dengan negara.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu, Kabupaten Jombang merupakan kabupaten yang terletak berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di sebelah utara, Kabupaten Kediri di sebelah selatan, Kabupaten Mojokerto sebelah timur, dan Kabupaten Nganjuk di sebelah barat. Meskipun Jombang bukan termasuk ibu kota provinsi, namun Jombang berada di perlintasan jalur yang menghubungkan Ibukota Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini yang semakin pesat, Jombang juga mengalami kemajuan dalam bidang teknologi yakni salah satunya ada suatu desa di kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur yang sudah menerapkan aplikasi sistem informasi desa dalam mewujudkan transparansi dana desa dan meningkatkan pelayanan. Desa tersebut adalah Desa Pulosari yang berjarak \pm 8 Km dari kecamatan dan \pm 35 Km dari kabupaten atau pusat kota yang ditempuh dengan waktu \pm 45 menit yang ditempuh dengan kendaraan bermotor. Letaknya yang lumayan jauh dari pusat kota tersebut yang menarik perhatian untuk meneliti desa Pulosari yang sudah menerapkan sistem informasi desa (SID) di desanya.

Alasan pemilihan desa Pulosari ini selain karena letaknya ini juga dikarenakan Pulosari merupakan desa percontohan bagi desa lainnya yang juga menerapkan aplikasi Sistem Informasi Desa, dan *website* desa Pulosari merupakan *website* desa yang paling banyak dikunjungi atau dilihat khalayak umum. Menurut sekretaris desa Pulosari “ada banyak desa di Kabupaten Jombang yang mulai menerapkan aplikasi SID dan belajar dari desa Pulosari salah satunya yaitu desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh. Hal ini merupakan salah satu upaya di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan suatu pemerintahan yang baik, karena masyarakat bisa mengakses semua informasi tentang desa tersebut melalui aplikasi SID. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari demokratisasi.

Hadiwijoyo (2012:52-53) mengatakan bahwa keberadaan lembaga-lembaga non pemerintahan dalam konteks kemajuan ini merupakan bagian dari penguatan *civil society* yang dianggap secara cepat dapat berpengaruh luar biasa terhadap berdirinya demokratisasi. Artinya *civil society* dapat mendorong pemerintahan yang demokratis. Indonesia merupakan negara yang menganut pemerintahan demokrasi maka peran *civil society* atau peran masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong mewujudkan pemerintahan yang demokratis, karena yang menjadi peran utama adalah masyarakat yang berada di luar pemerintahan

yaitu masyarakat umum dan orang yang berada di dalam pemerintahan merupakan penyalur aspirasi masyarakat yang menampung pendapat dari masyarakat.

Hadiwijoyo (2012:122) mengatakan bahwa adanya pemberdayaan *civil society* menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai salah satu jalan dalam demokratisasi. Demokratisasi melalui *civil society* menempatkan bahwa terbentuknya suatu masyarakat yang relatif tidak mudah terpengaruh oleh dominasi negara dan tersedianya ruang publik yang bebas merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak terbatas. Salah satu bentuk tersedianya ruang publik ini adalah adanya teknologi internet. Internet dapat menjadi ruang publik yang dapat menghubungkan interaksi secara global dengan masyarakat di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini menjadikan manusia dalam berhubungan antar manusia seakan tidak ada lagi batasan waktu dan tempat. Masyarakat yang sudah terkena dampak kemajuan di bidang teknologi contohnya adalah adanya internet yang meluas sampai pada masyarakat pedesaan yang didukung dengan adanya *smartphone* yang canggih, sehingga mempermudah orang untuk berkomunikasi dan mengakses informasi yang diinginkan.

Informasi mengenai rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat melalui media teknologi internet kondisi ini karena disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat di era digital saat ini yang semakin maju dan bergantung pada kecanggihan teknologi informasi melalui internet, sehingga diperlukan inovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berupa transparansi terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai jalannya pemerintahan di desanya dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya suatu pemerintahan, karena setiap warga negara memiliki hak untuk dapat berpartisipasi di dalamnya dan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan transparansi atau informasi kepada khalayak umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan “dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana yang diberikan kepada setiap desa sangat besar dan meningkat pada setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Humas Kemenku (kementerian keuangan) bahwa “Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan untuk setiap desa. Pada tahun 2015, dana

desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta". (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>, diakses pada tanggal 14 Februari 2018). Besarnya dana yang diberikan ini mengakibatkan peluang korupsi semakin besar apabila tidak diimbangi dengan adanya pengawasan terhadap anggaran dana tersebut.

Besarnya dana yang diberikan ini mengakibatkan peluang untuk melakukan korupsi semakin besar apabila tidak diimbangi dengan adanya pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran dana tersebut. Berdasarkan berita dari Merdeka.com bahwa pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebesar 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Desa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, tahun 2016 Rp 49,98 dan tahun 2017 Rp 60 triliun. Menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang memperoleh dana desa, pada tahun 2017 ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, yakni kepala desanya ditangkap, karena telah melakukan penyelewengan dana desa. (<https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-danadesa-sampai-900-kades-terciduk-aparat-splitnews-2.html>, diakses pada tanggal 14 maret 2018).

Terjadinya peningkatan terhadap dana desa yang diberikan setiap tahun dan kasus korupsi yang juga meningkat hal ini diperlukan adanya suatu alat atau media yang dapat mengontrol jalannya suatu pemerintahan agar dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang paling besar, partisipasi masyarakat dalam suatu pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mendukung hal tersebut. Masyarakat harus tanggap dan berpartisipasi terhadap keberlangsungan pemerintahan di desanya baik dalam pembangunan ataupun dalam pengelolaan dana desa dan di dalam pengambilan keputusan di desanya.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Sekretaris desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, pada hari kamis tanggal 21 Desember 2017 pukul 12.30 WIB diperoleh informasi bahwa desa memerlukan adanya pengelolaan keuangan desa melalui desa akuntabilitas (transparansi dana desa) dalam pengelolaan APBDes sebagai upaya transparansi publik. Sebelumnya dengan kondisi pengelolaan keuangan desa dan tidak ada transparansi yang menyebabkan masyarakat tidak dapat memantau pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat kurang berperan aktif di dalam mengontrol APBDes. Hal-hal tersebut yang dapat menimbulkan pandangan yang buruk terhadap pemerintah, meskipun

disisi lain masyarakat menginginkan transparansi publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang harusnya diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Kebijakan desa Pulosari untuk menerapkan Sistem Informasi Desa berbasis *website* merupakan sebuah keputusan yang dipilih oleh pemerintah desa di dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan APBDesa agar terdapat keterbukaan terhadap masyarakat desa Pulosari maupun kalayak umum.

Menurut Solekhan (2014:144) partisipasi, merupakan keikutsertaan atau keterlibatan secara sadar dan sukarela untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan. Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris *participation* yang berarti peran serta. Pengertian yang lebih luas ini bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Namun dalam realitasnya di lapangan masyarakat tidak selalu ikut berpartisipasi secara aktif di dalam pengawasan keuangan daerah, supaya partisipasi masyarakat bisa berjalan lebih optimal maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih mengoptimalkan pada peranan dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat, media masa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Masyarakat merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu pemerintahan dalam hal ini yaitu partisipasi masyarakat. Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila antara pemerintah dan masyarakat terjalin hubungan dan komunikasi yang baik. Adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan wujud dari pemerintahan yang demokratis.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berasal dari kesadaran pada diri sendiri dan juga dapat didorong oleh motivasi dari kepemimpinan kepala desa. Yettu dalam penelitiannya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Moskona di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni". Di dalam membangun suatu pemerintahan diperlukan adanya kerelaan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan dan pengalokasian dana desa, untuk itu perlu adanya motivasi dan sarana melalui kepemimpinan kepala desa untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat supaya memiliki ketrampilan dan dapat mandiri untuk bertugas

mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Kartika dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo” (2012: 183-184). menjelaskan bahwa faktor pendukung yang ditemui masyarakat dalam mengelola ADD adalah pemerintah desa yang bersikap transparan kepada masyarakat mengenai jumlah ADD yang diterima dari kabupaten dan juga adanya dukungan SDM yaitu partisipasi dari masyarakat yang mampu mempersiapkan laporan yang harus dipertanggung jawabkan oleh setiap desa. Alokasi dana desa merupakan bantuan hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bantuan hibah yang dialokasikan tersebut bersumber dari dana APBD yang tentunya sudah disesuaikan dengan kemampuan daerah. ADD yang diprioritaskan untuk kemajuan desa ini pada dasarnya mengacu dan menggunakan prinsip-prinsip partisipatif, secara bersama masyarakat turut serta untuk membangun wilayahnya secara swadaya dan bertanggungjawab dalam memperbaiki lingkungannya dengan memegang kebersamaan, saling rasa, dan saling karsa.

Untuk mencapai pengelolaan APBD yang baik ini tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan melekat). Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang mempunyai tugas untuk mengontrol proses perencanaan dan pengendalian APBD. Pengawasan terhadap APBD ini diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengelolaan APBD yang baik sangat penting terhadap kelangsungan dan perkembangan organisasi, karena memiliki kaitan yang erat dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk berperan aktif di dalamnya. Permasalahannya disini belum adanya wadah yang dapat digunakan masyarakat untuk mengontrol dana desa, sehingga keterbukaan atau transparansi terhadap masyarakat masih kurang, karena itu diperlukan suatu sarana agar masyarakat dapat berperan aktif di dalam mengontrol dana desa.

Mengacu pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 4 butir a bahwa “pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama”. Mengacu pada UU tersebut desa Pulosari menerapkan sistem informasi desa untuk mengembangkan potensi wilayahnya tersebut. Bukan

hanya itu, Sistem Informasi Desa digunakan untuk pengelolaan keuangan desa meliputi pengelolaan APBDesa. Sistem Informasi Desa yang biasa disingkat dengan SID adalah sistem olah data dan informasi yang dapat dikelola oleh pemerintah dan komunitas desa dalam dua ranah yaitu; *offline* dan *online*. Disaat *offline*, aplikasi masih dapat digunakan dalam jaringan lokal oleh pemerintah desa dengan menginstal terlebih dahulu aplikasinya pada komputer server yang ada di kantor desa dan dioperasikan sebagai *server*. Sistem *offline* ini biasa digunakan dalam harian oleh aparatur, kemudian *database* yang sudah diolah tadi dapat diinput ke sistem *online* secara berkala, sehingga data akan menjadi valid. SID akan optimal jika terhubung ke internet sebagai sistem *online* berbasis *website*, sedangkan SID *online* akan otomatis berfungsi sebagai *website* desa. *Website* desa ini memiliki fungsi yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian depan (*front-end*) yang bisa diakses oleh publik dan bagian dalam (*back-end*) yang hanya bisa diakses oleh administrator sistem.

Jadi berawal dari masalah tersebut pemerintah desa Pulosari menerapkan sebuah aplikasi yang berbasis *website*, sebagai bentuk sarana bagi masyarakat agar dapat mengawasi jalannya suatu pemerintahan di desanya, karena semua informasi tentang desa tersebut sudah ada di dalam *website* desa Pulosari, selain mengontrol APBDes masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalam pemanfaatan dana desa tersebut, yaitu misalnya di dalam pengelolaan desa wisata yang ada di desa Pulosari. Dulunya masyarakat sangat pasif dalam mengontrol dan mengawasi jalannya suatu pemerintahan atau bahkan tidak mau tahu dengan pengelolaan APBDes karena kurangnya sarana dan juga informasi. Hal ini yang mendorong pemerintah desa sehingga menciptakan *website* desa tersebut.

Dengan adanya sistem informasi desa (SID), informasi menjadi terbuka dan lebih transparan karena dapat diakses oleh siapa saja terutama pada masyarakat lokal kemudian masyarakat umum, pihak swasta, Pemerintah Kabupaten atau Kota, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan SID. SID dapat menguatkan dasar-dasar dalam merencanakan sebuah program serta dapat mempercepat pengambilan keputusan dalam membangun sebuah desa yang lebih tepat sasaran, karena masyarakat desa Pulosari dapat mengakses *website* desa Pulosari, maka masyarakat juga dapat melihat keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDesa melalui aplikasi SID yang dijalankan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Kedua, apa faktor penghambat

partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan APBDesa melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Manfaat Penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep terutama dalam hal memahami partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDesa melalui aplikasi SID. Manfaat praktis bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan referensi bagi pemerintah dan khususnya Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dalam memberikan transparansi APBDes kepada masyarakat. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan baik, khususnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes dengan adanya transparansi berupa adanya aplikasi SID.

Batasan Penelitian ini agar penelitian terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini hanya membahas permasalahan tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDes melalui aplikasi SID di desa Pulosari. Pembatasan pengawasan terhadap APBDes dalam penelitian ini adalah mulai dari tahap pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan sampai dengan tahap partisipasi dalam evaluasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2015:61), membedakan partisipasi menjadi empat jenis. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat ikut serta dalam menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti mengikuti rapat, diskusi, memberikan tanggapan, dan menolak terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai sumber utama pembangunan. Ada tiga ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan meliputi; pertama, menggerakkan sumber daya dan dana; kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi; dan ketiga,

penjabaran program. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai, dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar keberhasilan program yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi merupakan partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pelaksanaan program, apakah pelaksanaan program yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:130). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai partisipasi masyarakat desa Pulosari dalam mengontrol APBDesa. Bentuk-bentuk partisipasinya mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa tempat lokasi merupakan desa yang sudah menerapkan SID dan menjadi desa percontohan bagi desa lain yang juga menerapkan SID di Kabupaten Jombang.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *Purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita inginkan sehingga akan memudahkan untuk memperoleh situasi sosial yang diteliti. Teknik *Purposive sampling* dipilih oleh peneliti dengan alasan bisa dijadikan sebagai pemberi informasi terkait dengan masalah penelitian. Berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan, subjek penelitian yang dipilih antara lain Widji (sekretaris desa), Rokim (kepala desa), Purnomo (ketua RW 4), Subur (ketua RT 5), El Nattan (Wakil ketua karang taruna), Nisa (Golongan muda desa Pulosari).

Keenam subjek penelitian tersebut dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu; subjek yang paham akan teknologi internet, subjek penelitian yang bersedia untuk menjadi informan dan, subjek penelitian adalah masyarakat yang mengetahui SID serta mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dan mengembangkan desanya.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan berlangsung terus-menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing atau verification).

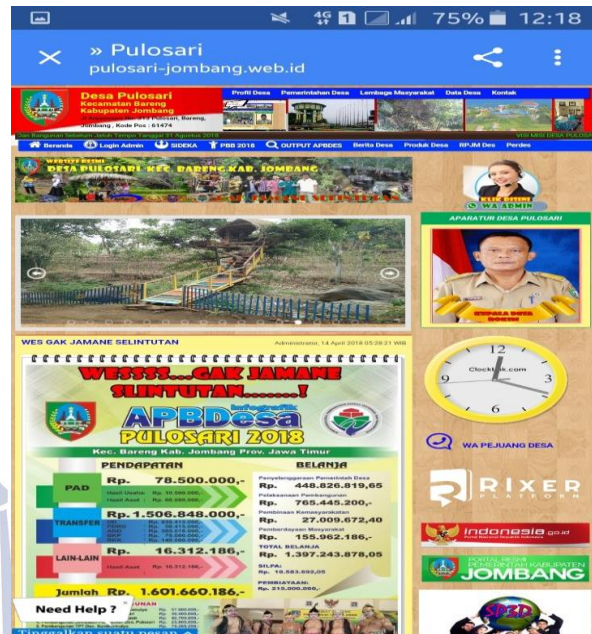
HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi APBDesa melalui aplikasi SID yang dijalankan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

Berdasarkan data yang dihasilkan melalui penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi maka diperoleh informasi terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes melalui aplikasi SID di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.

Sistem informasi desa (SID) Desa Pulosari ini merupakan prioritas di Kabupaten Jombang karena Desa Pulosari ini merupakan salah satu desa yang menerapkan SID berbasis *website* dan menjadi percontohan bagi desa lain yang juga menerapkan SID. Sistem informasi desa ini terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah anggaran dana desa, pemerintah desa, pelayanan administrasi persuratan maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Aplikasi ini dibangun secara partisipatif agar dapat membantu memudahkan pemerintah desa untuk memberikan sarana serta transparansi kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah desa dan masyarakat tidak ada yang ditutupi atau dirahasiakan, jadi masyarakat bisa ikut memantau program desa Pulosari.

Pada halaman awal aplikasi SID dipaparkan tentang APBDes tahun 2018, dengan cara ini masyarakat dapat melihat dengan jelas tentang catatan atau laporan keluar dan masuknya keuangan desa Pulosari. Hal tersebut menjadikan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mengetahui APBDes desa Pulosari karena selain pada baner yang dipasang di kantor desa di dalam *website* sudah terpapar tentang hal tersebut. Bahkan APBDes tahun sebelumnya juga masih bisa dibuka dan dilihat pada *websitenya*.



Gambar 4.4 Tampilan Aplikasi SID desa Pulosari (dokumen pemerintah desa Pulosari tahun 2018)

Partisipasi yang diidentifikasi adalah partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam empat hal yakni pembuatan keputusan tentang penggunaan APBDes yang dilaksanakan di desa Pulosari, pelaksanaan pengawasan APBDes melalui aplikasi SID, partisipasi masyarakat di dalam pengambilan manfaat, serta partisipasi masyarakat dalam evaluasi program yang telah dilaksanakan terkait dengan APBDes melalui aplikasi SID. Keempat hal tersebut akan diidentifikasi sebagai berikut.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan APBDes melalui SID di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa masyarakat desa Pulosari yang dipilih sebagai informan disini telah mengetahui aplikasi SID yang diterapkan di desa Pulosari. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh wakil ketua karang taruna desa Pulosari yang bernama El Nattan yang telah mengetahui bahwa desa Pulosari menggunakan aplikasi SID sebagai bentuk transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. El Nattan mengetahui aplikasi ini berawal dari diadakannya sosialisasi dan launching awal penggunaan aplikasi SID di desa Pulosari, sedangkan bentuk partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan melalui *website* ini belum terlihat karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara langsung melalui rapat atau pertemuan. Berikut pernyataannya.

"Iya saya mengetahui tentang aplikasi SID yang diterapkan di desa Pulosari. Isi dari

aplikasi SID mulai dari keperluan surat kependudukan sampai dengan transparansi pemerintah terkait dengan keuangan atau dana desa. Saya mengetahui SID ini berawal dari diadakannya sosialisasi pada awal launching SID di desa Pulosari dua tahun yang lalu, untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui *website* ini tidak ada karena di dalam pengambilan keputusan dilakukan secara langsung melalui rapat bersama masyarakat". (hasil wawancara 20 september 2018)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nisa yang merupakan golongan muda desa Pulosari, yang mengatakan bahwa telah mengetahui adanya aplikasi SID di desa Pulosari sejak aplikasi ini disosialisasikan kepada masyarakat, sedangkan untuk partisipasi di dalam pengambilan keputusan melalui *website* ini tidak ada wadahnya karena proses pengambilan keputusan diambil bersama melalui rapat secara langsung. Berikut pernyataannya.

"Iya mbak saya mengetahui aplikasi SID yang sudah diterapkan desa Pulosari sejak dua tahun yang lalu ini. Saya mengetahui saat di adakannya sosialisasi kepada semua elemen masyarakat pada saat launching awal di kantor desa Pulosari yang dihadiri oleh bapak Bupati Jombang pada saat itu, sedangkan dalam bentuk partisipasi pengambilan keputusan melalui *website* ini tidak ada karena tidak ada wadah untuk menampung pendapat dan aspirasi dari masyarakat". (hasil wawancara 10 Juli 2018)

Pernyataan yang selanjutnya disampaikan oleh Purnomo yang menyatakan bahwa telah mengetahui aplikasi SID yang diterapkan di desa Pulosari sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan kalayak umum. Berikut pernyataannya.

"....saya mengetahui aplikasi SID yang diterapkan di desa Pulosari ini merupakan bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, saya mengetahui aplikasi ini sejak launching awal yaitu dua tahun lalu di kantor desa Pulosari bersama dengan masyarakat desa Pulosari dan bapak Bupati Jombang. (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Pernyataan yang terakhir yang disampaikan oleh Subur bahwa beliau mengetahui terkait aplikasi SID yang diterapkan di desa Pulosari yaitu mulai dari persuratan sampai dengan laporan keuangan yang merupakan bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa Pulosari. Berikut pernyataannya.

"Iya tahu mbak SID ini sudah berjalan dua tahun diterapkan di desa Pulosari. Aplikasi tersebut berisi mulai dari persuratan untuk

urusan kependudukan sampai dengan laporan keuangan dana desa Pulosari hal itu merupakan bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa Pulosari kepada masyarakat, namun untuk wadah dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini tidak ada. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara langsung namun tetap melibatkan semua elemen masyarakat". (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Berdasarkan partisipasi yang telah dilakukan oleh informan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Pulosari telah mengetahui adanya aplikasi SID yang diterapkan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Isi atau informasi serta kegunaan dari aplikasi SID tersebut. Masyarakat desa Pulosari mengetahui tentang aplikasi SID sejak diadakan sosialisasi pada saat *launching* awal yang dihadiri seluruh kalangan masyarakat dan Bupati Jombang dua tahun yang lalu, sedangkan partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan melalui *website* ini tidak ada karena di dalam *website* tersebut tidak ada komponen yang menunjukkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, pada saat ini partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dilakukan secara langsung melalui pertemuan atau rapat.

Partisipasi dalam pelaksanaan untuk mengawasi APBDes melalui aplikasi SID di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Aplikasi SID ini sudah berjalan selama dua tahun di desa Pulosari. Pada pembahasan hasil penelitian yang diidentifikasi adalah pengawasan APBDes yang dilakukan oleh masyarakat melalui aplikasi SID di desa Pulosari. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan masyarakat terkait dengan laporan penggunaan dana yang ditransparansikan oleh pemerintah desa Pulosari melalui aplikasi SID berbasis *website*. Adanya transparansi tersebut masyarakat bisa melihat semua laporan terkait penggunaan dana desa.

Kepala desa Pulosari yakni Rokhim melihat bahwa partisipasi masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan pengawasan APBDes melalui aplikasi SID, bentuk dari pengawasan masyarakat ini adalah masyarakat desa Pulosari yang menguasai internet dan SID selalu memantau *website* tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut.

"....alhamdulillah partisipasi masyarakat desa Pulosari dalam pengawasan APDes melalui aplikasi SID ini sudah cukup baik mbak selain mereka aktif dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat juga berpartisipasi

menggunakan aplikasi SID untuk sekedar melihat atau bertanya terkait laporan penggunaan dana desa yang di upload pada *website* desa”. (hasil wawancara 6 september 2018)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Widji yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan APBDes yakni melihat transparansi yang dilakukan pemerintah desa Pulosari melalui *website* desa. Berikut ini pernyataannya.

“Ya untuk partisipasi masyarakatnya dalam pengawasan APBDes melalui aplikasi SID ini yakni dengan melihat pada laporan penggunaan dana desa pada pemasukan dan pengeluaran dana yang dimiliki dan diterima desa. Hal itu dapat dilihat dari pengunjung *website* desa yang tidak hanya masyarakat desa Pulosari yang dapat melihat dan mengakses tetapi juga masyarakat luar desa Pulosari, hal ini dapat dibuktikan bahwa untuk membuka *website* desa Pulosari tidak ketentuan atau kata kuncinya”. (hasil wawancara 6 September 2018)

Pernyataan serupa disampaikan oleh El Nattan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes masyarakat desa Pulosari cukup baik yakni melalui pengawsan langsung dan pengawasan melalui *website* desa. Berikut pernyataannya.

“...untuk pelaksanaan pengawasan APBDes melalui *website* ini dilakukan oleh masyarakat desa Pulosari khususnya yang mengerti dan memahami teknologi yaitu internet. Terutama pada golongan muda seperti karang taruna ini saya juga sering membuka dan melihat terkait dana desa yang diperuntukan kepentingan bersama. Untuk dana kegiatan karang taruna ini langsung diserahkan pada pengurus inti dan pada setiap kegiatan untuk dibuat laporan pertanggungjawabannya”. (hasil wawancara 13 September 2018)

Pernyataan yang lain diungkapkan oleh Purnomo pemerintah desa Pulosari menggunakan aplikasi SID sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pengawasan APBDes melalui aplikasi SID ini dilakukan oleh Golongan Muda dan orang yang mengerti internet, yakni dengan mengawasi laporan penggunaan dana desa yang di laporkan pada *website* desa Pulosari dan dengan begitu masyarakat mengetahui pengeluaran dan pemasukan dana desa Pulosari. Berikut pernyataannya.

“...aplikasi SID ini merupakan bentuk transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Semua masyarakat bisa melihat terkait penggunaan dana desa Pulosari di

dalam aplikasi SID. Namun disini yang melakukan pengawasan APBDes adalah orang-orang yang mengerti internet karena aplikasi ini terhubung dengan internet. Terutama pada golongan muda yang tergabung dalam karang taruna yang mengawasi laporan yang ada di dalam *website* desa”. (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Subur yang menyatakan bahwa pengawasan APBDes melalui aplikasi SID ini dilakukan oleh orang yang memahami teknologi yaitu internet. Terutama ini dilakukan golongan muda yang tergabung dalam karang taruna. Berikut pernyataannya.

“...di dalam pengawasan APBDes melalui aplikasi SID yang memiliki peran adalah masyarakat yang memahami teknologi internet, terutama golongan muda seperti anggota karang taruna yang memantau terkait penggunaan dana desa yang digunakan yang dilaporkan di dalam *website* desa tersebut. Tetapi masih ada kekurangan karena ada masyarakat yang sudah memahami internet dan tidak memanfaatkannya dengan lebih maksimal”. (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes melalui *website* masih pasif, hal ini dibuktikan bahwa masyarakat hanya memantau saja jalannya penggunaan dana desa dan mereka cenderung menunggu ketika muncul suatu masalah.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat terkait program yang telah dibuat tentang penggunaan APBDes melalui aplikasi SID. Pada bagian ini partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat yang dimaksud adalah dengan adanya aplikasi ini apakah manfaat yang diperoleh masyarakat desa Pulosari. Menurut El Nattan dengan adanya aplikasi ini sangat membantu masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan di desa Pulosari. Berikut ini pernyataannya.

“...kalau menurut saya sih dengan adanya aplikasi SID ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan di desa Pulosari khususnya dalam pengelolaan anggaran dana desa, karena masyarakat dapat memantau laporan keuangan yang di laporkan di dalam *website* ini”. (hasil wawancara 13 september 2018)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Purnomo yakni dengan adanya aplikasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat bahwa dengan adanya aplikasi SID pemerintahan saat ini menjadi

transparan dan masyarakat bisa memantaunya di dalam *website* desa tersebut. Berikut pernyataannya.

“Engge sae mbak mulai pertama aplikasi niki wonten pemerintah desa dados transparan kale masyarakat. Website desa niki saget didamel ngawasi penggunaan dana desa. Website desa niki gadah manfaat katah damel dalam e pemerintahan desa Pulosari”.
“ya bagus mbak sejak Pulosari menerapkan aplikasi ini pemerintah desa menjadi lebih transparan kepada masyarakat. *Website* desa ini dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan dana desa. *Website* desa ini mempunyai banyak manfaat bagi jalannya pemerintahan desa Pulosari”. (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat ini dengan adanya aplikasi SID masyarakat desa Pulosari memperoleh manfaat yaitu bisa memantau transparansi yang dilakukan pemerintah desa Pulosari melalui *website*, yakni dengan memantau penggunaan dana desa yang diupload pada *website* desa tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi terhadap program terkait pelaksanaan APBDes melalui aplikasi SID. Pada bagian ini partisipasi masyarakat dalam evaluasi yang dimaksud adalah pendapat dari masyarakat terhadap adanya Aplikasi SID sebagai bentuk transparansi dari pemerintah desa. Menurut Rokhim dengan adanya SID ini membantu perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa Pulosari. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut.

“...sejak diterapkan aplikasi SID di desa Pulosari ini membantu memudahkan tugas pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena semua informasi sudah ada pada *website* desa tersebut sehingga ini lebih efektif dan efisien. Selain itu juga terbangun kedekatan antara masyarakat dengan pemerintah desa karena transparansi yang dilakukan tersebut, selain itu masyarakat juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat. (hasil wawancara 6 September 2018)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Widji yang menilai bahwa adanya aplikasi SID sebagai bentuk transparansi dari pemerintah desa sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi desa Pulosari. Berikut pernyataannya.

“Ya itu mbak adanya aplikasi SID sebagai bentuk transparansi pemerintah desa ini sesuai dengan visi dan misi desa Pulosari yakni ingin memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat, dan saya akan terus mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan perkembangan zaman. (hasil wawancara 10 Juli 2018)

Pernyataan selanjutnya diungkapkan oleh El Nattan yakni bahwa adanya Aplikasi SID ini sangat membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah desa terkait dengan transparansi yang dilakukan melalui aplikasi SID tersebut. Berikut pernyataannya.

“Saya mendukung adanya aplikasi SID sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, karena melalui aplikasi ini kita bisa memantau kinerja pemerintah terkait dengan kegiatan dan laporan penggunaan dana yang dapat dilihat sewaktu-waktu melalui *website* desa Pulosari, dengan adanya aplikasi tersebut tidak ada lagi yang ditutupi oleh pemerintah sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat”. (Hasil wawancara 13 September 2018)

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Purnomo yang menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi SID partisipasi masyarakat menjadi semakin meningkat karena masyarakat memiliki rasa ingin tahu dengan aplikasi tersebut.

“...dengan adanya aplikasi SID ini partisipasi masyarakat menjadi meningkat karena masyarakat memiliki rasa ingin tahu dengan aplikasi tersebut, dengan pemerintah menjadi lebih terbuka kepada masyarakat dan semua informasi keuangan desa yang dapat dilihat sewaktu-waktu oleh masyarakat melalui *website* tersebut. Jadi ya aplikasi ini sangat baik dan membantu mbak”. (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Subur yang menyatakan bahwa dengan adanya aplikasi ini masyarakat menjadi lebih aktif karena keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa melalui Aplikasi SID tersebut. Berikut pernyataannya.

“Yah adanya aplikasi SID ini sangat baik karena partisipasi masyarakat meningkat. Dengan keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa melalui aplikasi SID ini sehingga tidak ada penghalang atau batasan antara pemerintah dengan masyarakat terjalin kedekatan. Masyarakat menggunakan aplikasi SID ini untuk melihat laporan pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan melihat kenyataannya di lapangan ketika mereka juga terlibat dalam penggunaan dana desa tersebut”. (hasil wawancara 20 Juli 2018)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, masyarakat desa Pulosari menilai bahwa dengan adanya aplikasi SID ini sangat membantu dan saling

menguntungkan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, selain itu dengan adanya aplikasi SID ini kedekatan antara masyarakat dengan pemerintah desa menjadi lebih baik karena tidak ada lagi yang ditutupi. Pemerintah menjadi lebih terbuka dengan memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang di laporkan di dalam aplikasi SID berbasis *website* yang diterapkan di desa Pulosari.

Masyarakat menggunakan aplikasi SID untuk berpartisipasi pada saat ingin bertanya dan mengetahui informasi melalui kritik dan saran pada link komentar yang tersedia pada *website* desa yang tersebut. Bentuk pengawasannya adalah masyarakat ingin tau tentang penggunaan dana desa karena mereka ingin klarifikasi dari pemegang aplikasi SID. Dalam hal ini pemegang aplikasi SID mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan memberi penjelasan atas pertanyaan tersebut. Namun sejauh ini masyarakat desa Pulosari menaruh kepercayaan terhadap transparansi yang dilakukan pemerintah desa, sehingga masyarakat dalam pengawasan hanya memantau penggunaan dana dengan melihat saja pada *website* tersebut.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan APBDesa melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang

Berdasarkan temuan peneliti bahwa faktor penghambat dari partisipasi masyarakat ini dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan temuan peneliti kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan APBDes melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan rasa peduli dari masyarakat karena berdasarkan temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa masih ada masyarakat yang dapat menggunakan internet dan mengetahui tentang SID tetapi belum memanfaatkannya dengan maksimal. Masyarakat sudah dapat mengoperasikan aplikasi SID akan tetapi masih belum dimanfaatkan secara maksimal, masyarakat hanya sebatas tahu mengenai proses dan pelayanan kependudukan sekarang menjadi lebih mudah dan lebih efisien.

Jaringan Internet yang masih terbatas. Adanya internet ini sangat membantu sekali dalam menjalankan SID, Kepala Desa Pulosari menyediakan *wifi* agar dapat menjangkau masyarakat walaupun sekarang masih belum gratis. Koneksi internet sangat membantu dalam penerapan SID akan tetapi terkadang kendala *wifi* yang eror atau tidak dapat terhubung, hal itu membuat pelaksanaan SID terhambat, karena itu diperlukan menggunakan jalur *offline* dalam mengakses kebutuhan yang diperlukan untuk bisa mengatasi masalah tersebut, sehingga ini menghambat partisipasi masyarakat ketika

akan melakukan kontrol terhadap transparansi yang dilakukan pemerintah melalui aplikasi SID berbasis *website* yang diterapkan di desa Pulosari.

Keterpercayaan dan Keterbukaan. Keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa Pulosari yang berakibat pada timbulnya kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat beranggapan bahwa tidak perlu ada tindakan pengawasan yang ketat, jadi masyarakat tidak bertindak preventif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap APBDes melalui aplikasi SID, seharusnya lebih baik mencegah daripada menyelesaikan masalah.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Pulosari dalam Pengawasan terhadap APBDes digambarkan pada tabel 1

Tabel 1 Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Pulosari

Bentuk partisipasi	Dokumen tasi	Wawancara	Observasi
Pengambilan keputusan	-	Masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan bersama	Rapat langsung dan semua elemen masyarakat ikut terlibat di dalamnya.
Pelaksanaan	Dokument asi dapat dilihat melalui <i>website</i> desa Pulosari	Masyarakat berpartisipasi pada saat ada masalah	Dua orang saja yang berkomentar
Pengambilan manfaat	-	Dengan adanya aplikasi SID pemerintah menjadi lebih transparan.	Masyarakat yang mengerti internet dan SID
Evaluasi	Dokument asi dapat dilihat melalui <i>website</i> desa Pulosari	Masyarakat mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dengan melihat	-

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDesa melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”. Berdasarkan paparan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti maka langkah selanjutnya yaitu membahas hasil data penelitian tersebut sesuai dengan metode dan dikaji dengan menggunakan teori yang relevan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Pembahasan

dan analisis hasil-hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut.

Dalam pembahasan yang pertama membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website*. Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-63) membagi partisipasi masyarakat menjadi empat macam yaitu *pertama*, Partisipasi dalam pengambilan keputusan; *kedua* Partisipasi dalam pelaksanaan; *ketiga*, Partisipasi dalam pengambilan manfaat; *keempat*, Partisipasi dalam evaluasi.

Berdasarkan temuan penelitian ini partisipasi masyarakat di desa Pulosari secara keseluruhan sudah cukup baik dan berjalan sesuai dengan tujuan dari diterapkannya aplikasi SID. Tujuan dari diterapkannya SID yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparansi kepada masyarakat dengan cara mengubah cara berfikir bahwa pengetahuan dan kemampuan mengakses informasi sangat penting di tengah kemajuan teknologi dalam kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam penerapan aplikasi SID dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa Pulosari. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat desa Pulosari bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari diterapkannya aplikasi SID.

Tujuan penerapan aplikasi SID adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta merupakan salah satu wujud transparansi dari pemerintah desa terhadap masyarakat sehingga tercapailah suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi masyarakat menurut Rodliyah (2013:33-34) adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari gagasan perumusan kebijaksanaan sampai pada pelaksanaan program. Pada hakekatnya masyarakat merupakan orang yang memiliki peran terpenting dalam pembangunan negara, karena masyarakat mempunyai peran sebagai obyek dan subyek pembangunan negara.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam diterapkannya aplikasi SID ini diharapkan agar terjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Pulosari itu sendiri. Aplikasi SID adalah aplikasi yang dibuat untuk kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga partisipasi aktif masyarakat diperlukan dalam mendukung penerapan aplikasi tersebut. Bentuk partisipasinya adalah berpartisipasi dalam memanfaatkan aplikasi tersebut dalam keperluan kependudukan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa seperti dengan terus memantau

laporan keuangan desa, maka partisipasi akan meningkat dengan sendirinya.

Tugas dari semua masyarakat desa Pulosari adalah melaksanakan komitmen berupa partisipasi yaitu memberi usulan pendapat, pertanyaan kritik maupun saran terkait dengan APBDes dan turut serta menggunakan SID dan mengawasi anggaran dana desa melalui aplikasi SID. Kegiatan tersebut untuk mendukung keberhasilan yang ingin dicapai dari penerapan aplikasi SID tersebut. Partisipasi aktif yang dilakukan oleh semua masyarakat memiliki manfaat yang penting, mengingat suatu program itu dibuat dengan tujuan untuk masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sehingga antara pemerintah desa dengan masyarakat tercipta hubungan yang baik karena adanya transparansi. Aplikasi SID ini memiliki banyak informasi di dalamnya yang terkait dengan desa Pulosari, salah satunya adalah anggaran dana desa Pulosari. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa Pulosari dalam penggunaan dan pengawasan APBDes melalui Aplikasi SID, maka digunakan teori dari Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-63).

Partisipasi masyarakat desa Pulosari dalam penggunaan dan pengawasan APBDes melalui Aplikasi SID. Partisipasi masyarakat merupakan kewajiban sebagai warga negara yakni menyampaikan aspirasi atau pendapat dan menerima pendapat orang lain dengan terbuka. Partisipasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa Pulosari adalah menggunakan dan memanfaatkan aplikasi SID yang diterapkan untuk mengawasi kegiatan serta APBDes di desa Pulosari. Tujuannya sebagai bentuk pengawasan terhadap transparansi yang dilakukan pemerintah desa. Semua masyarakat desa Pulosari dapat memanfaatkan pelayanan cepat yang ditawarkan pemerintah desa melalui aplikasi SID tersebut. Untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengawasan APBDes melalui aplikasi SID digunakan teori dari Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-63), yaitu.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk mencapai kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama Cohen dan Uphoff (1979 dalam Dwiningrum, 2011:61). Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan antara lain masyarakat desa Pulosari ikut menyumbangkan gagasan atau ide, serta memberikan tanggapan atau penolakan apabila terdapat ketidaksesuaian, namun dalam hal ini dilakukan secara langsung melalui pertemuan atau rapat tidak melalui *website*. Penerapan aplikasi SID di Desa Pulosari ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan dari pemerintah yakni ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat desa Pulosari. Salah satu contoh adalah di dalam aplikasi SID terdapat semua laporan APBDes Pulosari sehingga transparansi yang dilakukan pemerintah desa dapat diketahui masyarakat Desa Pulosari maupun dari luar desa. Dalam kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran desa pemerintah desa juga melibatkan warga desanya agar mereka mengetahui pengeluaran yang telah digunakan.

Transparansi juga dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembuatan banner yang di pasang di kantor desa Pulosari. Disitu juga dicantumkan mengenai APBDes secara rinci mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang ada, kegiatan yang dilakukan juga dipaparkan pada banner tersebut, sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat tidak mengetahui dana yang diperoleh dan digunakan untuk desa Pulosari. Pemasangan *banner* tersebut juga atas inisiatif desa sendiri yang ingin memberikan keterbukaan kepada masyarakat. Dalam hal ini desa Pulosari yang pertama memasang banner dan saat ini diikuti oleh desa desa lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, kepala desa dan sekretaris Desa Pulosari sebagai subyek yang mendukung penerapan aplikasi SID masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengawasan APBDes, seperti menyampaikan pendapat atau argumen apabila informasi yang disampaikan pengelola aplikasi SID kurang dimengerti, sehingga keputusan merupakan hasil dari yang di sepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Menurut Purnomo selaku ketua RW menjelaskan bahwa setiap bulan atau pada saat anggaran dana turun dan akan melakukan pembangunan maka akan diadakan pertemuan dengan ketua RT dan RW yang mengajak masyarakat desa Pulosari juga, karena pemerintah saat ini sudah baik dan sudah sangat transparan, dan tidak pernah ada pungutan dalam pengurusan surat yang dilakukan pemerintah desa.

Partisipasi vertikal dapat terjadi karena dalam suatu kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien (Efendi, 2002 dalam Dwiningrum, 2011:58). Dalam hal ini masyarakat desa Pulosari sebagai bawahan dari pengelola aplikasi SID Desa Pulosari. Pengelola aplikasi SID dalam hal ini sebagai bentuk lain dari pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan yang optimal kepada semua masyarakat desa Pulosari, sehingga mencapai keberhasilan dari tujuan penerapan aplikasi SID di Desa Pulosari.

Pengawasan terhadap APBDes melalui aplikasi SID ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memahami internet dan SID. Dalam kegiatan ini tidak hanya diam saja, namun sesekali menyampaikan pendapat apabila

informasi atau sosialisasi yang diberikan pemerintah yang diwakili oleh pengelola aplikasi SID yang dirasa kurang jelas, setiap pendapat yang disampaikan di dalam pertemuan selalu diterima dengan baik dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, seperti dapat dilihat ketika ada program yang akan dilakukan maka dilakukan sebuah pertemuan bersama semua elemen masyarakat.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena laporannya telah tercantum dalam kurun waktu satu tahun, dan bahkan masyarakat masih bisa melihat laporan pada tahun sebelumnya, antara pemerintah desa dengan masyarakat Pulosari tidak ada batasan. Dalam hal ini biasanya membahas mengenai besarnya dana desa yang diperoleh dan rancangan kegiatan yang akan dijalankan dengan dana desa yang diperoleh tersebut. Menurut beberapa narasumber dan sekretaris desa sejauh ini tidak ada masalah terkait dengan keuangan atau APBDes desa Pulosari.

Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan tindak lanjut dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, maupun tujuan Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61). masyarakat secara bersama-sama tidak hanya ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga ikut menjalin hubungan di dalam pelaksanaan kegiatan. Hal itu tertuang pada wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat desa Pulosari menyatakan bahwa sebagai masyarakat mereka melakukan pengawasan APBDes melalui aplikasi SID, seperti halnya di dalam melihat dan mengawasi laporan pemasukan dan pengeluaran yang di upload di dalam *website*. Hal serupa juga disampaikan oleh sekretaris desa Pulosari Widji bentuk partisipasi masyarakat mengenai APBdes ini adalah berpartisipasi dengan melihat dan mengawasi laporan pemasukan dan pengeluaran pada *website* desa.

Subur mengatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara langsung salah satunya adalah ketika ada sumbangan dana berupa uang maka pemerintah desa mengadakan pertemuan bersama masyarakat dipaparkan besarnya sumbangan yang diperoleh kemudian dari semua masyarakat itu untuk membentuk panitia untuk mengelola sumbangan yang diperoleh tersebut, ini berlaku untuk semua masyarakat yang mampu dan mau untuk berpartisipasi.

Perbedaan yang terjadi di desa Pulosari yaitu pada masa pemerintahan kepala desa yang sebelumnya tidak ada keterbukaan dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui secara rinci anggaran dana desa yang dikeluarkan untuk pembangunan desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Purnomo ketua RW 4 bahwa

pemerintahan pada saat ini sudah cukup baik karena pemerintah desa sudah terbuka dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat lebih meningkat karena pengetahuan atau informasi yang dimiliki dan diketahuinya dari transparansi yang dilakukan pemerintah.

Antara aparatur desa dengan masyarakat desa Pulosari juga terjalin hubungan yang baik karena aparatur desa memberikan kesempatan dan terbuka menerima usulan dari masyarakat selagi pendapat atau usulan yang diajukan itu tidak menyimpang, sehingga tidak ada halangan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, apabila ada yang ingin ditanyakan maka aparatur selalu siap dan terbuka untuk melayani masyarakat, tidak ada *intervensi* atau keterpaksaan yang dilakukan aparatur desa kepada masyarakat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan bentuk dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai dengan baik oleh berbagai pihak yang ikut berperan. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang dicapai (Cohen dan Uphoff, 1979 dalam Dwiningrum, 2011:62). Berdasarkan kualitas, keberhasilan pada suatu program ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerapan aplikasi SID dirasa sudah berhasil mencapai tujuan yang dibuat yaitu memberikan transparansi kepada masyarakat desa Pulosari. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Subur sebagai ketua RT 5, yaitu semua pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan desa sudah dicantumkan secara rinci pada *website* desa Pulosari, selain itu pelayanan pemerintah menjadi lebih optimal karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan lebih efisien. Adanya *website* tersebut membuat partisipasi masyarakat pun menjadi meningkat terbukti dari seringnya masyarakat mengunjungi atau membuka *website* desa tersebut baik mengurus persuratan ataupun hanya melihat pada APBDes yang merupakan salah satu bentuk kontrol yang dilakukan.

Widji sekretaris desa selaku pengelola dari *website* desa Pulosari juga menyebutkan bahwa jika partisipasi masyarakat tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap transparansi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, maka manfaat yang diperoleh akan sangat banyak, salah satunya yaitu dulu antara pemerintah dan masyarakat tidak terjalin kedekatan karena pemerintah desa yang kurang terbuka tetapi saat ini pemerintah telah memberikan sarana transparansi kepada masyarakat. Manfaat lain yang diperoleh adalah membantu mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat, sehingga ini bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan dan terciptanya sebuah pemerintahan yang baik. Menurut Widji sebagian besar yang berperan aktif ini antara lain ketua RT, RW, dan para pemuda desa Pulosari, namun kapasitas penilaiannya hanya sebatas wajar tidak ada kritik atau konflik yang terjadi.

Masyarakat desa Pulosari mudah untuk diajak berkoordinasi, sehingga masyarakat desa Pulosari mudah untuk berpartisipasi dalam menggunakan aplikasi SID. Tugas dari pengelola aplikasi SID ini juga merubah cara berfikir masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat demi menciptakan pemerintahan yang baik untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pengelola SID menanamkan beberapa sifat karakter yang dapat merubah pola pikir masyarakat desa Pulosari. Sifat karakter tersebut adalah sifat percaya diri dan tanggung jawab. Adanya sifat tersebut diharapkan masyarakat merubah pola pikirnya menjadi lebih berpartisipasi aktif dan tidak malu untuk menyampaikan pendapatnya dan bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan.

Partisipasi dalam Evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau terdapat penyimpangan (Cohen dan Uphoff, 1979 dalam Dwiningrum, 2011:63). Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dari penerapan aplikasi SID, maka dilakukan evaluasi program. Dalam partisipasi kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan secara menyeluruh sehingga perlu adanya evaluasi terhadap suatu program yang telah berjalan. Evaluasi dalam penerapan aplikasi SID dilakukan oleh pengelola *website* aplikasi SID dan kepala desa Pulosari. Laporan dibuat oleh pengelola *website* desa aplikasi SID.

Tidak hanya itu, sekretaris desa selain menjadi pengelola juga bertugas untuk mengembangkan aplikasi SID sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, jika ada masalah atau ketidakcocokan maka akan diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat desa Pulosari. Pengelola aplikasi SID ini juga mempunyai tugas untuk membuat artikel tentang desa Pulosari, jadi yang memegang penuh aplikasi ini adalah pengelola aplikasi ini yaitu sekretaris desa Pulosari.

Pembuatan laporan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan pada saat itu. Pengelola aplikasi mempunyai kewajiban untuk selalu mengisi laporan atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa Pulosari, sehingga sekretaris desa yang merupakan pengelola ini harus mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak ketinggalan zaman dan informasi-informasi

terbaru yang ada.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDesa melalui aplikasi SID berbasis website di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Partisipasi masyarakat dan faktor penghambat yang sesuai dengan tujuan penelitian. Meliputi analisis dari macam-macam partisipasi masyarakat yang dikaji menggunakan Teori Partisipasi Masyarakat (Cohen dan Uphoff, 1979 dalam Dwiningrum, 2011: 61-63). Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap APBDes melalui aplikasi SID berbasis *website* di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Sistem Informasi Desa (SID) merupakan aplikasi yang diterapkan desa Pulosari salah satunya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat Desa Pulosari. Di dalam SID terdapat program Desa Pulosari yang terkait dengan laporan pemasukan dan pengeluaran anggaran dana desa. Setiap kegiatan telah dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan ataupun dari artikel yang dibuat oleh pengelola aplikasi SID tersebut, dalam kegiatan ini bahwasannya sekretaris desa yang bertugas mengerjakan itu semua karena sebagai pemegang untuk bisa mengelola dan mengembangkan aplikasi SID sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* SID ini biasa dilakukan secara *online* dan *offline*, dengan begitu masyarakat desa Pulosari dapat berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap APBDes Pulosari melalui aplikasi SID. Bentuk peran aktif masyarakat mengenai APBDes ini adalah dalam hal Pembangunan Infrastruktur secara langsung. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini adalah datang langsung dalam pertemuan ketika akan dilaksanakan suatu program. Untuk partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan ini adalah masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemerintah desa, sehingga cenderung menunggu ketika timbul masalah, yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat ini masyarakat merasa dengan adanya aplikasi SID sangat membantu karena dapat membantu masyarakat untuk memantau transparansi yang dilakukan pemerintah desa Pulosari, yang terakhir ini partisipasi masyarakat dalam evaluasi, masyarakat dapat mengevaluasi program yang telah dilaksanakan melalui capaian monograf yang terdapat di *website* desa Pulosari.

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap

APBDes melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website*, yaitu: 1) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat, 2) Jaringan internet yang masih terbatas, 3) Keterpercayaan dan keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa tidak perlu dikontrol dengan ketat.

Saran

Berdasarkan paparan data, penemuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: Bagi pemerintah desa adalah diperlukan adanya penguatan jaringan internet agar masyarakat desa Pulosari dapat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja, dan perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat di dalam memanfaatkan internet dan aplikasi SID secara lebih maksimal. Bagi masyarakat fungsi kontrol secara preventif lebih baik dilakukan daripada ketika sudah timbul suatu masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, Faidul. 2015. *Sistem Informasi Desa di Kecamatan Pellangga Kabupaten Gowa*. Jurnal (Online)
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2015. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Humas kemenku, 2018, *Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2018*, (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> , diakses tanggal 14 februari 2018)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset
- Pratomo, Harwanto Bimo, *Gurih-gurih sedap korupsi dana desa sampai 900 kades terciduk aparat*, (<http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/22/kades-di-gresik-ini-korupsi-ratusan-juta-rupiah-dana-desa-begini-modusnya> , diakses tanggal 14 maret 2018)
- PP No. 8 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Desa

Yusron. 2009. *Elite Lokal Dan Civil Society*. Jakarta:
Pustaka Indonesia



UNESA
Universitas Negeri Surabaya